

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ramadhan, & Sugianto. (2025). *Collaborative strategy model between government and private sector in housing financing through the FLPP scheme in Indonesia*. Journal of Policy and Governance, 5(2), 234-256.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Perkembangan permukiman dan hunian layak Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. (2025). *Laporan penyaluran FLPP semester I tahun 2025*. Jakarta: BP TAPERA.
- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (2025). Penyaluran FLPP ditutup di level tertinggi sepanjang sejarah. Didapatkan dari <https://www.tapera.go.id/2025/12/penyaluran-flpp-ditutup-dilevel-tertinggi-sepanjang-sejarah/>
- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. (2024). *Laporan capaian akhir tahun anggaran 2024: Evaluasi pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema FLPP*. Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan BP Tapera.
- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. (2025). *Penyaluran dana FLPP capai 259.841 unit rumah, BP Tapera bakal gandeng 43 bank untuk tahun 2026* (Laporan Realisasi Akhir Tahun Buku 2025). Jakarta: BP Tapera. Diambil dari <https://tapera.go.id/>
- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. (2025). *Realisasi FLPP tembus 213.630 unit, BP Tapera genjot penyaluran jelang akhir tahun* (Siaran Pers Nomor: 65/SP/BP-TPR/11/2025). Jakarta: Deputi Komunikasi Publik BP Tapera.
- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. (2024). *Laporan capaian akhir tahun anggaran 2024: Evaluasi pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema FLPP*. Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan Perumahan BP Tapera.
- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. (2025). *Penyaluran dana FLPP capai 259.841 unit rumah, BP Tapera bakal gandeng 43 bank untuk tahun*

- 2026 (Laporan Realisasi Akhir Tahun Buku 2025). Jakarta: BP Tapera. Diambil dari <https://tapera.go.id/>
- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. (2025). *Realisasi FLPP tembus 213.630 unit, BP Tapera genjot penyaluran jelang akhir tahun* (Siaran Pers Nomor: 65/SP/BP-TPR/11/2025). Jakarta: Deputi Komunikasi Publik BP Tapera.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Jawa Barat catat realisasi FLPP tertinggi se-Indonesia* (Berita Publikasi Monitoring Evaluasi Rilis Agustus 2025). Bandung: Bappeda Jabar. Diambil dari <https://bappeda.jabarprov.go.id/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Laporan publikasi monitoring dan evaluasi triwulan III: Akselerasi penyerapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di koridor hotspot Jawa Barat*. Bandung: Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jabar.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Jawa Barat catat realisasi FLPP tertinggi se-Indonesia* (Berita Publikasi Monitoring Evaluasi Rilis Agustus 2025). Bandung: Bappeda Jabar. Diambil dari <https://bappeda.jabarprov.go.id/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Laporan publikasi monitoring dan evaluasi triwulan III: Akselerasi penyerapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di koridor hotspot Jawa Barat*. Bandung: Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jabar.
- Dellarosawati, I., Itaratnasari, M. D., & Rahadi, R. A. (2022). *Public policy and financial regulation in housing sector: Case study one million houses and KPR FLPP*. International Journal of Innovation in Enterprise System, 6(1), 50-60.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Infopublik. (2024). BP TAPERA akselerasi penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Retrieved from <https://infopublik.id>
- International Policy Exchange Institute (IPEI). (2024). *Dampak ekonomi program FLPP terhadap sektor konstruksi Indonesia 2024*. Jakarta: IPEI.
- Iriawan, H. (2024). *Kebijakan publik: Teori, analisis, dan studi kasus*. Jakarta: Rajawali Press.
- Islam, S., Mujab, A. S., Pradhana, T. E. B., & Andalas, N. D. (2024). Housing policy in Indonesia: A structured review. In *PSIC 2024: Proceedings of the 2nd Pacific Science and Innovation Conference* (pp. 235-251).
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). *Strategi akselerasi penyaluran FLPP 2024-2025*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2025). *Laporan progres program FLPP kuartal I tahun 2025*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat). (2002). Jakarta: Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2025). *Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah*(Dokumen Cetak Biru Kebijakan Perumahan Nasional). Jakarta: Kementerian PKP.
- Klijn, E. H., & Skelcher, C. (2007). Democracy and governance networks: Compatible or not? *Public Administration*, 85(3), 587-608.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, how*. New York: McGraw-Hill.
- Lusida, P. T. (2025). *Peran regulator Kementerian PKP dan manajemen koordinasi antar-aktor dalam policy networks penyaluran perumahan subsidi* (Wawancara mendalam oleh Y. A. Rahmadana). Transkrip Wawancara Pendahuluan Skripsi S1 Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta. (Tidak Diterbitkan).
- Nugroho, H. P. (2025). *Dinamika kelembagaan BP TAPERA dan skema finansial hulu-hilir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)*

- (Wawancara mendalam oleh Y. A. Rahmadana). Transkrip Wawancara Pendahuluan Skripsi S1 Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta. (Tidak Diterbitkan).
- Pangeran, & Khoirunurrofik. (2023). *Healthy living in subsidized houses? Evidence from Indonesia's FLPP program*. Health Policy and Planning, 38(5), 642-656.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. (2021). Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1493, 2021. Jakarta: BP Tapera.
- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. (2025). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025. Jakarta: Kementerian PKP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahmadana, Y. Wawancara pribadi, tidak diterbitkan: Dinamika kelembagaan BP TAPERA dan skema finansial hulu-hilir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Wawancara pribadi, tidak diterbitkan.
- Sari, A. R. (2023). Housing development for low-income communities (MBR) in Indonesia: A policy network analysis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 156-178.
- Simbolon, B., Rusli, B., & Candradewini, C. (2023). *Pendekatan dan pemecahan masalah implementasi kebijakan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Inovasi Publik, 9(4), 276-298.

- Stone, D. A. (2012). *Policy paradox: The art of political decision making* (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Sururi, A. (2024). *The effectiveness of housing finance policy innovation for low-income communities in Indonesia*. *Journal of Housing and Built Environment*, 39(2), 523-542.
- Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. (2022). *Housing policy for low-income communities in Indonesia and its reforms: An overview*. *Public Policy and Administration*, 21(1), 158-174.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu administrasi publik kontemporer* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thompson, J. L., & Martin, F. (2005). *Strategic management: Awareness, analysis and change* (5th ed.). London: Cengage Learning Business. [Power levers, stakeholder analysis framework, power-interest positioning pp. 346-366]
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
- Wibowo, A., Sari, N., & Rahman, F. (2023). Impact of financial transparency on public trust: Evidence from housing subsidy programs in Indonesia. *Public Administration Review*, 83(4), 892-910.
- Widianingsih, I., Sururi, A., Ismanto, S. U., & Rusli, B. (2022). Housing policy for low-income communities in Indonesia and its reforms: New public management and post-NPM perspectives. *DECISION: Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 34-52.